

FORUM

Mengelola Konflik Pilgub Jatim 2008

Oleh ALI MUHDI

Kendati Pemilihan Gubernur Jawa Timur masih satu tahun lagi, ibarat masuk zona peperangan, Jawa Timur kini tengah masuk kategori rawan "ranjau". Salah langkah, menjadi bumerang. Karena satu persatu pasangan kandidat hasil konvensi maupun rekomendasi partai politik mulai memamerkan diri. Konsolidasi internal parpol makin diintensifkan.

Tokoh struktural dan kultural pun secara dini mulai dipasang sebagai pemangku moral sekaligus modal politik. Namun, seiring dengan hal tersebut, aroma gesekan dan potensi konflik politik dari hulu ke hilir pun semilir mulai menyeruak.

Dalam kontestasi politik, pertentangan, interest group, konflik merupakan keniscayaan yang tak terhindarkan dan pasti terjadi. Tanpa pertautan fenomena tersebut, demokrasi akan mati suri. Karena secara teoritis, dalam arena politik orang berpikir kalkulatif rasional dan realistis, siapa mendapat apa. Dengan latar pemikiran itulah, kemudian berbagai parpol dengan segenap potensi yang dimilikinya mulai mendesain strategi dan taktik untuk diimplementasikan tanpa melihat multiplier effect ke depan, khususnya terkait dengan kehidupan dunia ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan sebagai dampaknya.

Di Jatim, pilgub secara langsung pada tahun 2008 merupakan pengalaman pertama. Sementara di berbagai daerah, pemilihan kepala

daerah (pilkada) secara langsung telah banyak digelar. Namun, dari sekian test case pilkada di Jatim, kerap kali menyisakan banyak konflik, baik vertikal dan horisontal, elite, dan grass root, kultural dan struktural, maupun sosial, ekonomi serta hukum. Padahal, korban utama dari konflik tersebut adalah masa depan rakyat sebagai subyek pelayanan publik. Makin dalam konflik pemilihan, makin lama pula waktu penyelesaiannya. Rakyat dulunya dielus-elus, dipertuahi, digiring, dan diberi kail "kue", ujungnya justru menerima "sampah"-nya.

Jika me-review konflik yang berlatar kekuasaan, pasti kita ingat kasus aksi penumbangan pohon di jalan raya jalur Surabaya-Jember sebagai bentuk dukungan kepada Gus Dur sebagai Presiden yang mau diturunkan melalui sidang istimewa. Dalam pilkada, muncul konflik Tuban, ketika kemenangan Haeny sebagai Bupati justru menyulut terjadinya kriminalitas dan kerusuhan massif akibat konflik ekonomi politik yang cukup dominan "diperankan" suaminya. Demikian pula Banyuwangi, kendati tidak separah di Tuban, terpilihnya Ratna juga bermasalah. Cuma progresifnya, dalam Pilkada Banyuwangi masyarakat mudah "dijinnakkan".

Terkait dengan Pilgub Jatim 2008 ini, ada banyak "lubang" konflik yang berpotensi muncul sebagai bagian tak terelakkan. Pertama, dalam pemutakhiran dan validasi daftar pemilih yang dilakukan Dispenduk Jatim. Pada tahap ini, semua stakeholder pilgub, baik parpol, panwas, lembaga pemantau, LSM, dan masyarakat tertuju pada akurat tidaknya hasil pendataan Dispenduk Jatim.

Kedua, adanya segregasi konstituen loyalis antar-parpol maupun tokoh yang akan dipilih. Artinya segregasi politik yang diciptakan oleh kekuatan parpol maupun to-

koh tersebut justru menghegemoni kondisi psikologis loyalisnya.

Ketiga, karakteristik masyarakat Jatim yang cukup heterogen. Seperti hasil klasifikasi Huub de Jonge asal Belanda, Jatim terdiri dari kaum priyayi, santri, dan abangan. Tidak heran jika Jatim merupakan basis Nahdlatul Ulama. Mayoritas mereka merupakan kaum pesisir yang notabene memiliki sensitivitas tinggi dan temperamental. Dari sisi SDM, Jatim menduduki peringkat pertama angka buta aksara secara nasional, yakni 4,6 juta (usia 15-44 tahun) dari total nasional 15,04 juta (*Kompas* Jatim, 17/6/2006). Heterogenitas serta keterbelakangan SDM inilah yang potensial mudah tersulut. Istilah sosiolog Emil Durkheim, di Jatim masih dominan solidaritas mekanik daripada solidaritas organik. Ibarat lebah, satu disakiti, semua ikut marah. Sistem patriarkhal yang mewariskan budaya ini.

Keempat, adanya polemik anggaran pilgub yang kini berpotensi terus menggelembung tanpa ada kepastian peruntukan yang jelas dan detail yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kelima, masa penghitungan suara. Tahapan ini merupakan kunci dari semua tahapan sebelumnya. Sebab, tingkat kerentanan konflik dan resistensi masyarakat justru menjadi klimaks pada tahap ini.

Hemat penulis, senyampang masih cukup waktu, sejatinya ada banyak hal yang perlu diperhatikan secara komprehensif oleh semua elemen terkait. Pertama, Dispenduk Jatim sejak dini harus melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih secara akurat melalui mekanisme yang sistematis, terukur, dan terarah. Dengan maksud efektivitas dan efisiensi, jika memungkinkan KPU Jatim beserta pemerintah provinsi secara koordinatif mewujudkan proyek KTP massal secara gratis yang sekaligus berfungsi sebagai kartu pe-

milih. Identifikasi mudah, masyarakat terbantu pemilihan KTP.

Kedua, pemimpin parpol beserta tokoh kulturalnya harus melakukan pendidikan politik yang mencerahkan dan bukan menyebarkan loyalisnya. Hal ini bisa dilakukan dengan pemantapan sikap saling menghargai perbedaan serta pewacanaan bahwa "beda parpol yes, berkonflik no".

Ketiga, pentingnya peran dominan tokoh pesantren maupun kultural untuk menaungi dan menjembatani munculnya embrio konflik yang terjadi pada umatnya tanpa ada diskriminasi.

Keempat, terkait anggaran pilgub. Sejak dini perlu ada kepastian dan kejelasan peruntukan anggaran, siapa mengelola apa dan angkanya berapa. Terkait dengan hal ini, sangat penting perannya jika dibentuk tim audit independen yang diberi keleluasaan penuh untuk mengetahui jalur peruntukannya secara akurat.

Kelima, agar perhitungan suara berlangsung fair dan transparan, sejatinya harus ada lembaga penghitung suara perbandingan selain dari KPU dan parpol pendukung yang secara kompetitif bisa dipertanggungjawabkan akurasi dan validitas datanya.

Keenam, untuk menghindari konflik hukum berkepanjangan, perlu komitmen konkret sejak awal dari panwas dan aparat hukum untuk bersinergi dalam menegakan hukum tanpa pandang bulu.

Ketujuh, perlu berbagai kajian akademis yang bisa menciptakan pencerahan bagi semua elemen terkait guna terwujudnya iklim kondusif serta stabilitas politik pra dan pasca-pilgub. Wallahu a'lam bish showab.

ALI MUHDI

Dosen Ilmu Politik Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel